BAB IV

KESIMPULAN

Pemerintah Jepang cukup memperhatikan kesejahteraan penyandang disabilitas, misalnya dengan membuat undang-undang yang berkaitan dengan kesejahteraan penyandang disabilitas. Salah satu hukum ini adalah *Shougaisha Koyou No Shokushin Nado Ni Kansuru Houritsu*, salah satu poin dalam undang-undang ini dipersyaratkan bahwa perusahaan swasta wajib memenuhi kuota penyandang disabilitas sebesar 2,0%.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh *Ministry of Health Labor and Welfare*, kuota ini belum benar-benar terpenuhi hingga tahun 2015, dengan penyerapan terbesar 1,88% pada tahun 2015, namun angka ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya penyerapan tenaga kerja penyandang disabilitas di Jepang. Meskipun secara umum kuota penyandang disabilitas belum terpenuhi, namun ada beberapa perusahaan yang mampu melebihi jumlah kuota tersebut. Salah satunya adalah Fast Retailing Co. pemilik brand pakaian UNIQLO yang mampu memenuhi kuota penyandang disabilitas sebesar 5,87% pada tahun 2015. Selain itu, terdapat pula beberapa perusahaan yang mampu memenuhi kuota ini. Secara umum, hampir semua bidang usaha dapat mempekerjakan penyandang disabilitas. Bidang kedokteran dan kesejahteraan sosial paling banyak mempekerjakan penyandang disabilitas sebanyak 2,30 %.

Dengan adanya undang-undang yang mengatur mengenai hak bagi penyandang disabilitas untuk bekerja, dan sudah mulai banyaknya perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas, ini membuktikan bahwa baik pemerintah Jepang serta masyarakat Jepang secara umum menghargai para penyandang disabilitas, serta memberi mereka kesempatan bekerja yang sama dengan orang normal. Penulis berharap kemajuan Jepang dalam memberdayakan penyandang disabilitas dalam dunia kerja ini dapat dicontoh dan diikuti oleh pemerintah Indonesia.